

The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen

DJI Vs IHSG? Sebuah Analisis Dampak Terjadinya Krisis Global

Berto Usman

Deskripsi Pelaksanaan Delapan Prinsip Manajemen Mutu Dalam Penerapan ISO 9001:2008 Pada PT. Ottopaint Colours Indonesia Tangerang Selatan

*Karona Cahya Susena
Witman Rasyid
Sugeng Susetyo*

Persepsi, Sikap, dan Perilaku Pegawai Terhadap Pelaksanaan Program e-KTP Di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Study Deskriptif Kualitatif)

*Yogi Martha Kesuma
Fahrudin JS Pareke
Nasution*

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (*Studi Deskriptif Kualitatif*)

*Revan Hardiawan
Kamaludin
Nasution*

Kepuasan Kerja Karyawan Bank Bengkulu Cabang Utama

*Hery Susetyo
Witman Rasyid
Sugeng Susetyo*

Peran Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemeditasi Dalam Pengaruh Insentif Dengan Prestasi Kerja

*Rika Andriani Putri
Fahrudin JS Pareke
Sularsih Anggarawati*

Studi Implementasi *Learning Performance Index* Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

*Yusdi Ilham Yuniardi
Handoko Hadiyanto
Trisna Murni*

Implementasi *Standard Operation Procedures* (SOP) Pelayanan Perkara

*Apriska Maghlianda
Witman Rasyid
Sugeng Susetyo*

Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Yang Sebanding Di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Camels

*M. Zaenal Muttaqin
Kamaludin
Sri Adji Prabawa*



The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen



Volume 13, Nomor 1, Oktober 2012

DAFTAR ISI

DJI Vs IHSG? Sebuah Analisis Dampak Terjadinya Krisis Global <i>Berto Usman</i>	1 - 14
Deskripsi Pelaksanaan Delapan Prinsip Manajemen Mutu Dalam Penerapan ISO 9001:2008 Pada PT. Ottopaint Colours Indonesia Tangerang Selatan <i>Karona Cahya Susena</i> <i>Witman Rasyid</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	15 - 25
Persepsi, Sikap, dan Perilaku Pegawai Terhadap Pelaksanaan Program e-KTP Di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Study Deskriptif Kualitatif) <i>Yogi Martha Kesuma</i> <i>Fahrudin JS Pareke</i> <i>Nasution</i>	26 - 37
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif) <i>Revan Hardiawan</i> <i>Kamaludin</i> <i>Nasution</i>	38 - 50
Kepuasan Kerja Karyawan Bank Bengkulu Cabang Utama <i>Hery Susetyo</i> <i>Witman Rasyid</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	51 - 61
Peran Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemediasi Dalam Pengaruh Insentif Dengan Prestasi Kerja <i>Rika Andriani Putri</i> <i>Fahrudin JS Pareke</i> <i>Sularsih Anggarawati</i>	62 - 74
Studi Implementasi <i>Learning Performance Index</i> Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu <i>Yusdi Ilham Yuniardi</i> <i>Handoko Hadiyanto</i> <i>Trisna Murni</i>	75 - 83

DAFTAR ISI

Implementasi <i>Standard Operation Procedures</i> (SOP) Pelayanan Perkara <i>Apriska Maghlianda</i> <i>Witman Rasyid</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	84 - 94
Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Yang Sebanding Di Indonesia Dengan Menggunakan Rasio Camels <i>M. Zaenal Muttaqin</i> <i>Kamaludin</i> <i>Sri Adji Prabawa</i>	95 - 107

PERSEPSI, SIKAP, DAN PERILAKU PEGAWAI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM e-KTP DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU (STUDY DESKRIPTIF KUALITATIF)

Yogi Martha Kesuma

Fahrudin JS Pareke dan Nasution

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu 38371A

ABSTRACT

The objective of this research is to describe the perception, attitude, and behavior of the employees about implementation electronics - I.D. card at the sub district of selebar office in Bengkulu City. In addition, this research intend to investigate: 1) perception of the employees about implementation electronics - I.D. card, 2) attitude of the employees about implementation electronics - I.D. card, 3) behavior of the employees about implementation electronics - I.D. card. The method applied for this research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research are in-depth interview with interview guidance as the instrument. The subjects of this research were 14 people: 1 people sub distric secretary, 5 people chief of sub distric of Selebar office, 8 employees of the sub distric of Selebar office. The result from this research showed that the employees have the same perceptions, attitudes and behavior for support implementation electronics - I.D. card, recommended that employees maintaining and improving it, to achieve effectiveness and optimization of electronics - I.D. card.

Keywords: Employees; Perception; Attitude; Behavior

PENDAHULUAN

Pada saat ini kebijakan tentang pentingnya pendataan penduduk pencatatan sipil sangat ditekankan oleh pemerintah dan sudah menjadi program nasional, hal ini tidak terlepas dari kompleksitasnya persoalan yang terjadi dan berkembang di lingkungan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kebijakan pendataan penduduk yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk bahan data dan informasi yang benar dan akuntabel merupakan sasaran utama pemerintah. Sebagai bentuk dari implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pendataan penduduk yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, maka direalisasikan peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang penerapan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) secara nasional, atau secara umum lebih dikenal dengan sebutan elekteonik KTP atau disingkat dengan e-KTP.

Dengan diberlakukannya penerapan e-KTP di masyarakat maka diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan pendataan penduduk yang akurat, karena jika bercermin kebelakang tentang pembuatan KTP konvensional di Indonesia akan sangat memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu KTP. Fakta tersebut memberi peluang kepada penduduk untuk berbuat curang kepada negara seperti: menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor, mengamankan tindak pidana korupsi, serta dapat dijadikan alat untuk penyamaran identitas oleh oknum kriminal. Selain itu pembuatan e-KTP juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya database kependudukan sebagai bahan informasi yang benar dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga data pemilih yang selama ini sering bermasalah tidak terjadi lagi dan seluruh masyarakat Indonesia terjamin hak pilihnya.

Pada dasarnya penerapan pelaksanaan program pemerintah e-KTP secara nasional ini merupakan kebijakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia sehingga untuk melaksanakannya diperlukan kerjasama yang baik terutama dibidang sumber daya manusia (SDM), khususnya pegawai negeri sipil (PNS). Karena sebaik apapun program yang direncanakan dan secanggih apapun teknologi yang digunakan tanpa adanya dukungan dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki *skill*, *knowladge*, dan *abbility* yang cakap maka hal tersebut tidak akan dapat terlaksana, “Kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian-pencapaian tujuan organisasi, baik terhadap kinerja, profit, maupun kelangsungan hidup organisasi itu sendiri” (Martoyo, 2000). Termasuk juga dengan penyelenggaraan program e-KTP.

Kerena program e-KTP secara nasional ini merupakan program baru dan belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya, maka dalam pelaksanaannya secara tidak langsung akan mengundang timbulnya berbagai macam stimulus atau rangsangan-rangsangan kepada pegawai negeri selaku pelakasana suksesi program e-KTP nasional, untuk mempersepsikan, menentukan sikap, serta membentuk perilaku mereka terhadap pelaksanaan program e-KTP. “Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi sikap dan pembentukan perilaku”.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil studi kasus di Kantor Camat Kecamatan Selebar, karena kantor kecamatan ini merupakan kantor kecamatan tempat peneliti tinggal, sekaligus juga merupakan tempat pelaksanaan program e-KTP untuk wilayah kota. Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: **“Persepsi, Sikap, dan Perilaku Pegawai terhadap Pelaksanaan Program e-KTP, di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (Study Deskriptif Kualitatif)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mecakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (*input*), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi sikap dan pembentukan perilaku”.

Menurut Schiffman dan Kanuk (2007:148) persepsi adalah suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang penuh arti dan saling terkait. Persepsi tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tapi juga pada pengalaman dan sikap dari individu. Irwanto (2002:71) menyatakan persepsi adalah proses diterimanya rangsangan (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti karena persepsi bukan sekedar penginderaan. Dengan demikian dalam pembentukan persepsi terjadi proses penafsiran terhadap stimulus yang diindera oleh individu yang bertujuan untuk memberikan arti terhadap stimulus tersebut.

Persepsi terjadi dalam bentuk individu yang mempersepsi, bahkan di dalam obyek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Adapun sifat persepsi antara lain:

1. Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan makna dari seseorang, obyek atau peristiwa, kita harus memiliki dasar atau basis untuk melakukan interpretasi. Dasar ini biasanya ditemukan pada pengalaman masa lalu dengan orang, obyek atau peristiwa tersebut, atau dengan hal-hal yang menyerupainya. Tanpa landasan pengalaman sebagai perbandingan tidak mungkin untuk mempretasikan suatu makna, sebab ini akan membawa kita kepada keyakinan tersebut.

2. Persepsi adalah selektif

Ketika mempersepsikan, hanya bagian-bagian tertentu dari suatu obyek atau orang. Dengan kata lain, ketika melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu dari obyek-obyek persepsi kita dan mengabaikan yang lain.

3. Persepsi adalah penyimpulan

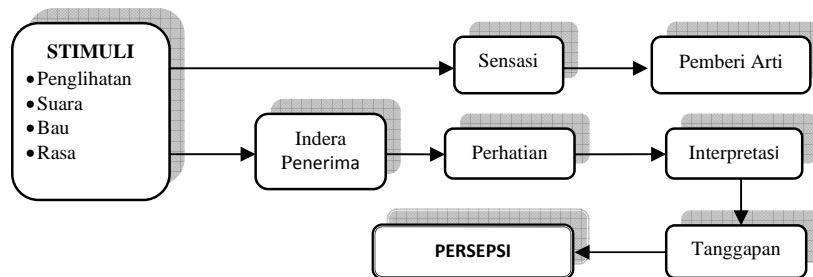
Proses psikologis dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain, mempersepsikan makna adalah melompat kepada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap oleh panca indra. Sifat ini saling mengisi dengan sifat kedua. Pada sifat kedua persepsi hanya selektif, karena keterbatasan kapasitas otak, maka hanya kita dapat mempersepsi sebagian karakteristik dari obyek. Melalui penyimpulan ini kita berusaha untuk mendapatkan gambar yang lebih lengkap mengenai obyek yang kita persepsikan atas dasar sebagian karakteristik dari obyek tersebut.

4. Persepsi tidak akurat

Setiap persepsi yang dilakukan, akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh pengalaman masa lalu, selektifitas, dan penyimpulan. Biasanya tidak keakuratan ini terjadi karena penyimpulan yang terlalu mudah, atau menyamaratakan. Adakalanya persepsi tidak akurat karena orang menganggap sama, sesuatu yang sebenarnya hanya mirip. Dan semakin tidak akurat persepsinya.

5. Persepsi adalah evaluatif

Persepsi tidak akan pernah obyektif, karena ketika dilakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada obyek persepsi. Karena persepsi merupakan proses kognitif psikologis yang ada didalam diri kita, maka bersifat subjektif. Fisher mengemukakan bahwa persepsi bukan hanya merupakan proses inter pribadi tetapi juga sesuatu yang sangat pribadi, dan tidak terhindarkannyaketerlibatan pribadi dalam tindak persepsi menyebabkan persepsi yang sangat subjektif.



Gambar 1. Proses Pembentukan Persepsi
Sumber: Diadaptasi dari Solomon (Setiadi 2003:161)

Stimuli adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Seseorang merasakan bentuk, warna, sentuhan, aroma, suara dan rasa dari stimuli. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu persepsi memiliki sifat subyektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan realitas. Berikut gambar yang menjelaskan

bagaimana stimuli ditangkap melalui indera kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi). Berikut adalah gambar proses pembentukan persepsi.

Sikap

Menurut Azwar (2007) sikap adalah mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu, bahkan terhadap diri individu itu sendiri disebut fenomena sikap. Fenomena sikap yang timbul tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi tetapi juga dengan kaitannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh situasi di saat sekarang, dan oleh harapan-harapan untuk masa yang akan datang.

Robbins (2008:92) menyatakan bahwa sikap (*attitude*) merupakan pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Kreitner dan Kinicki (2005), menyatakan bahwa sikap sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk merespons suatu objek tertentu, atau dengan kata lain sikap merupakan suatu kecenderungan seseorang atau individu untuk merasakan dan bertindak sebagai bentuk respons dari rangsangan dari lingkungan yang ada disekitarnya. Jadi sikap belum merupakan suatu tindakan/aktivitas, akan tetapi merupakan faktor predisposisi bagi seseorang untuk berperilaku.

Azwar (2007) menyatakan bahwa sikap memiliki 3 komponen yang saling menunjang yaitu:

1. Komponen kognitif
Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap.
2. Komponen afektif
Komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.
3. Komponen perilaku
Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.

Lebih lanjut Luthas (2006:238) menyatakan bahwa dari 3 komponen sikap tersebut, hanya perilaku yang dapat diamati secara langsung, sedangkan 2 komponen lainnya yaitu emosi dan informasi tidak dapat diamati akan tetapi hanya dapat diduga. Selanjutnya Luthas menyatakan bahwa untuk mengubah sikap negatif salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan motivasi berupa *reward* dan pemberian informasi secara lengkap kepada seseorang yang memiliki sikap negatif.

Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo 2003), selanjutnya. Menurut Skinner,

seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori "S-O-R" atau Stimulus - Organisme - Respon, Skinner membedakan adanya dua proses yaitu:

1. Respondent respon atau reflexive, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan - rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut *eliciting stimulation* karena menimbulkan respon - respon yang relative tetap. Misalnya : makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan sebagainya. Respondent respon ini juga mencakup perilaku emosional misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih atau menangis, lulus ujian meluapkan kegembiraannya dengan mengadakan pesta, dan sebagainya.
2. Operant respon atau instrumental respon, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut *reinforcing stimulation* atau *reinforce*, karena memperkuat respon. Misalnya apabila seorang petugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik (respon terhadap uraian tugasnya atau job skripsi) kemudian memperoleh penghargaan dari atasanya (stimulus baru), maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang e-KTP

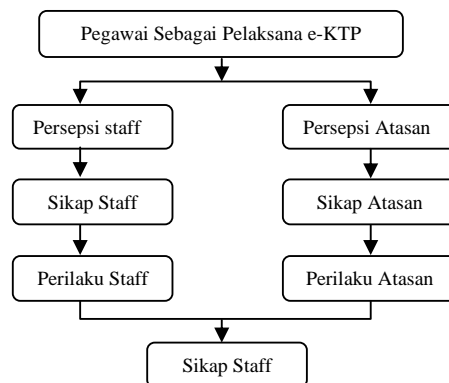
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010, tentang penyelenggaraan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), e-KTP adalah suatu identitas penduduk yang didesain dengan autentifikasi dan pengaman data tinggi dengan menanamkan chip didalam kartu yang mempunyai kemampuan autentifikasi, enkripsi dan tanda tangan digital.

Elektronik KTP, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-KTP memiliki beberapa elemen penting, di dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang e-KTP disebutkan bahwa e-KTP memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Nomor Induk Kependudukan
2. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Chip

Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2. Kerangka Analisis

Gambar 2. menjelaskan bahwa penelitian ini melakukan penelaahan terhadap tiga unsur yaitu terdiri dari persepsi, sikap, dan perilaku pegawai (atasan dan staf) di Kantor Camat Kecamatan Selebar kota Bengkulu, sehingga pada akhirnya dapat diketahui Efektifitas penyelenggaraan program e-KTP.

DESAIN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di mana metode ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan, mendiskripsikan secara sistematis, faktual, akurat serta berdasarkan fakta-fakta yang telah ada.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) konstruk menjadi variabel penelitian yang dapat di uji (Indrianto dan Supomo,2002) Adapun hal-hal yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Persepsi adalah proses kognitif pegawai negeri sipil baik itu atasan maupun pegawai/staf di Kantor Camat Kecamatan Selebar yang memungkinkan mereka dapat menafsirkan dan memahami tentang pelaksanaan e-KTP, persepsi yang dilihat terdiri dari:
 - Pandangan pribadi pegawai terhadap program e-KTP.
Dalam indikator ini, akan dilihat bagaimanakah pandangan pribadi pegawai terhadap program e-KTP yang masih tergolong baru, selanjutnya bagaimana pegawai memandang fenomena keterlambatan perekaman e-KTP.
 - Penyimpulan pribadi pegawai terhadap program e-KTP.
Dalam indikator ini, akan dilihat persepsi pegawai tentang penerapan e-KTP apakah bisa berjalan dengan baik ataupun tidak, selanjutnya juga akan dilihat keunggulan e-KTP jika dibandingkan dengan pendataan penduduk secara manual.
 - Penilaian/evaluasi pribadi pegawai terhadap program e-KTP
Dalam indikator ini yang akan dilihat adalah persepsi pegawai tentang kebijakan pemerintah yang mengeluarkan program e-KTP untuk mengatur sistem pencatatan penduduk, selain itu juga akan dilihat persepsi pegawai dalam menilai jalannya pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Selebar.
2. Sikap adalah tindakan dalam bentuk respons positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung dari atasan dan pegawai/staf, berkenaan dengan pelaksanaan e-KTP di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, indikator yang digunakan dalam melihat sikap pegawai disini adalah:
 - Perasaan pegawai terhadap penerapan e-KTP.
Dalam indikator ini akan dilihat bagaimana perasaan pegawai terkait pelaksanaan program e-KTP yang secara langsung akan menambah beban kerja pegawai, terutama bagi pegawai yang menjadi pelaksana teknis dalam pengoperasian perekaman e-KTP.
 - Emosional pegawai terhadap penerapan e-KTP.
Dalam indikator ini akan dilihat bagaimana pegawai menyikapi program e-KTP, pegawai yang ada sudah mampu atau belum dalam mendukung pelaksanaan e-KTP.
 - Identifikasi pegawai terhadap program e-KTP.
Dalam indikator ini akan dilihat apakah secara keseluruhan pegawai kecamatan mendukung pelaksanaan e-KTP, selanjutnya juga akan dilihat apakah pegawai pernah merasa keberatan dengan adanya program e-KTP ini.
3. Perilaku adalah semua kegiatan, aktivitas, atau tindakan, baik yang bisa diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang dilakukan oleh atasan dan pegawai

berkenaan dengan pelaksanaan e-KTP di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, indikator yang digunakan dalam melihat perilaku pegawai disini adalah:

- Peran Individual pegawai dalam mendukung program e-KTP.
Indikator ini akan mengkaji tentang bagaimana peran individu pegawai dalam mendukung program e-KTP dan cara pegawai dalam mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan e-KTP.
- Keterlibatan pegawai dalam mendukung program e-KTP.
Disini akan dilihat bagaimana peran pegawai dalam bekerja sama dengan rekan kerja dan kelompok atau bagian-bagian dalam mendukung pelaksanaan program e-KTP.

Instrumen

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam rangka menghimpun dan memperoleh data atau informasi yang tepat dan akurat, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada reponden mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. yang di lakukan oleh peneliti dengan cara mengorientasikan kepada perolehan data dan keterangan dari individu tertentu untuk keperluan informasi, perolehan sikap dan pendapat. Bungin (2000) menyatakan bahwa wawancara adalah memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut.

Di dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui persepsi sikap dan perilaku atasan serta pegawai/staf di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu mengenai pelaksanaan program e-KTP, Adapun responden dalam wawancara ini adalah 1 orang sekretaris camat, 5 orang kepala instansi, dan 8 orang pegawai/staf kantor camat kecamatan Selebar.

Metode Analisis

Analisis data menurut Moleong (2002) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan di dalam suatu pola ,kategori dan uraian dasar sehingga memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi uraian. Nasution (1996) analisis data di lakukan dengan tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data

Berbagai jenis data masukan pada peneliti yang berkaitan dengan Persepsi, sikap dan perilaku pegawai tentang Pelaksanaan program e-KTP, di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di lakukan seleksi dengan mereduksi data dan informasi yang difokuskan kepada hal-hal yang sangat penting dan signifikan. Tentunya dari hasil pada tahap reduksi ini diharapkan akan membantu peneliti dalam hal pencarian ulang data sehingga peneliti akan mendapatkan data yang valid dan akurat. Reduksi data adalah hal yang sangat penting sebagai upaya memisahkan jenis-jenis data dan informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak valid sehingga dapat mengakibatkan kerancuan data akibat dari tidak terfokuskan pada masalah pokok yang dibutuhkan.

2. Display Data

Pada tahap ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian tentang penilaian atau pandangan pegawai tentang pelaksanaan program e-KTP, pendapat mengenai penerapan program e-KTP tersebut, serta peran pegawai didalam pelaksanaan programn e-KTP setelah data tefokus dan di spesialisasikan, dibuat penyajian data berupa laporan, lalu disederhanakan dan disusun secara sistematis tentang hal-hal yang dapat memberi gambaran tentang Persepsi, sikap, dan perilaku pegawai terhadap pelaksanaan program e-KTP di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3. Mengambil kesimpulan Dan Verifikasi

Pada tahap ini dilakukan pencarian makna terhadap komponen-komponen data yang disajikan yaitu dengan mencermati pola-pola keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan dan verifikasi dilakukan peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan dilapangan lewat diskusi dengan dosen pembimbing, cek dan ricek dengan pihak terkait, sehingga penarikan kesimpulan terhadap persepsi, sikap, dan perilaku dari atasan dan pegawai/staf di Kantor Camat Kecamatan Selebar tentang pelaksanaan program e-KTP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pegawai di Kantor Camat Kecamatan Selebar yang terdiri dari 5 orang kepala instansi dan 8 orang staf, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai sudah memiliki persepsi yang sama dalam memandang program e-KTP. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesamaan pandangan dari atasan dan staf, dengan adanya kesamaan ini dapat menjadi hal yang positif bagi keberhasilan pelaksanaan program e-KTP di Kantor Camat Kecamatan Selebar, hal tersebut didukung oleh pendapat Mangkunegara (2001) yang menyatakan bahwa kesamaan persepsi dari individu-individu dalam suatu kelompok atau organisasi untuk menanggapi stimuli-stimuli dari suatu objek, nantinya akan berdampak pada pembentukan sikap, dan penciptaan perilaku sehingga dapat membantu kelompok atau organisasi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara pegawai secara umum memberikan pandangan bahwa program e-KTP merupakan suatu kebijakan baru yang direncanakan pemerintah untuk mengatur sistem pendataan kependudukan, sehingga nantinya akan tercipta suatu data penduduk yang akurat dan akuntabel, lewat program elektronik KTP ini. Dimana dalam pembuatannya e-KTP akan dilengkapi dengan berbagai macam identitas pribadi individu yang terdiri dari unsur biometri, meliputi sidik jari, iris mata dan identitas lainnya, serta dicatat berdasarkan nomor induk kependudukan, serta disimpan didalam data base. Selanjutnya dalam menyikapi keterlambatan perekaman program e-KTP pegawai secara umum memberikan juga terdapat kesamaan cara pandang, namun disini pandangan pegawai secara umum terbagi menjadi dua sisi, pertama pegawai memberikan pandangan positif, dengan kata lain pegawai memandang pengunduran waktu perekaman e-KTP sebagai waktu tambah dimana petugas lapangan akan mendapat kesempatan lebih dalam melayani masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP. Kedua pegawai memberikan pandangan negatif terhadap pengunduran waktu perekaman e-KTP, karena dianggap sebagai suatu pemborosan baik itu waktu ataupun dana selain itu pegawai juga menganggap pengunduran waktu perekaman e-KTP sebagai akibat dari kurang matangnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan e-KTP.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan atasan dan pegawai di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tentang persepsi pegawai dengan indikator penyimpulan pribadi pegawai tentang program e-KTP maka secara umum pegawai memberikan tanggapan yang relatif sama, yaitu untuk menyukseskan pelaksanaan program e-KTP maka perlu diadakan kerja sama yang solid diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan semua elemen yang tergabung didalamnya. Lalu tentang kelebihan e-KTP pegawai memberikan tanggapan bahwa program e-KTP akan lebih baik dalam mengatur data kependudukan, karena dengan e-KTP setiap KTP yang dimiliki individu akan memiliki ciri spesifikasi biometri tersendiri. Lalu berdasarkan hasil wawancara tentang persepsi pegawai dengan indikator Penilaian atau evaluasi pribadi pegawai terhadap program e-KTP, pegawai menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk meluncurkan program e-KTP sudah tepat terutama dengan tujuan mengatur dan memperbaiki sistem pendataan penduduk. Dalam proses pelaksanaan e-KTP di

kecamatan Selebar sendiri secara umum pegawai menyatakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, walaupun masih terdapat masalah teknis yang mengganggu jalannya proses perekaman e-KTP.

Sikap

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada pegawai yang mencakup kepala instansi dan staf di kantor camat kecamatan Selebar tentang sikap pegawai dalam pelaksanaan program e-KTP, dengan indikator pertama yaitu perasaan pegawai terhadap pelaksanaan program e-KTP, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua tanggapan pegawai dalam menyikapi pelaksanaan e-KTP yang secara tidak langsung akan menambah beban kerja pegawai, pertama pegawai yang terlibat langsung khususnya pada saat perekaman e-KTP, merasa sedikit keberatan dengan adanya pelaksanaan e-KTP karena mereka memiliki beban kerja yang lebih, mulai dari penambahan jam kerja untuk melayani masyarakat, adanya gangguan teknis pada alat e-KTP hingga ke masalah konflik kepada warga yang datang untuk perekaman e-KTP. Tanggapan kedua yaitu pegawai yang menyatakan tidak keberatan dengan pelaksanaan e-KTP, karena disini pegawai hanya bersifat membantu proses kelancaran pada pelaksanaan e-KTP dan tidak terlibat langsung pada saat perekaman e-KTP.

Selanjutnya dari hasil wawancara tentang sikap pegawai dengan indikator kedua emosional pegawai terhadap pelaksanaan program e-KTP, dapat disimpulkan bahwa secara umum pegawai yang ada di kantor camat kecamatan Selebar yakin dapat mendukung pelaksanaan program e-KTP, karena pegawai yang bersangkutan telah mendapat training dari pihak capil kota, walaupun kadang kala pegawai masih memiliki masalah teknis karena gangguan pada alat perekaman e-KTP. Lalu berdasarkan hasil wawancara tentang sikap pegawai dengan indikator ketiga identifikasi pegawai terhadap program e-KTP, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pegawai mendukung pelaksanaan program e-KTP dimana pegawai menganggap bahwa program ini akan dapat menghasilkan pendataan penduduk yang akurat dan akuntabel jika dikelola dengan baik.

Dari hasil wawancara diatas masih ditemui adanya sikap negatif pegawai yang masih agak keberatan dengan pelaksanaan e-KTP karena dapat menambah beban kerja mereka, dan berdasarkan wawancara kepada sekretaris camat, hal tersebut akan ditanggulangi dengan memberikan insentif tambahan kepada petugas teknis yang terlibat langsung dalam perekaman e-KTP. Hal ini didukung oleh pendapat dari Luthas (2006) yang menyatakan bahwa untuk mengubah sikap negatif salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan motivasi berupa *reward* dan pemberian informasi secara lengkap kepada seseorang yang memiliki sikap negatif.

Perilaku

Dari hasil penelitian dengan melaksanakan wawancara kepada kepala instansi dan staf kantor camat kecamatan Selebar tentang perilaku pegawai dalam pelaksanaan program e-KTP, dengan indikator pertama peran Individual pegawai dalam mendukung program e-KTP, maka dapat dilihat bahwa masing-masing individu telah melakukan usaha untuk mendukung kegiatan e-KTP. Untuk mengarahkan masyarakat dalam melakukan perekaman e-KTP pegawai melaksanakan sosialisasi, pengarahan, dan pembuatan pengumuman untuk masyarakat selain itu pegawai juga melaksanakan kerja sama dengan perangkat kecamatan mulai dari lurah, RW, dan RT dalam membagikan undangan panggilan perekaman e-KTP kepada masyarakat.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan kepala instansi dan staf kantor camat kecamatan Selebar tentang perilaku pegawai dalam pelaksanaan program e-KTP dengan indikator kedua Keterlibatan pegawai dalam mendukung program e-KTP, maka secara umum dapat

disimpulkan bahwa pegawai telah bekerja sesuai dengan tugas mereka pada masing-masing unit kerja, mereka memiliki tanggung jawab melakukan sosialisasi, memantau proses perekaman e-KTP, bekerja sama dengan pihak capil, menjaga keamanan proses pelaksanaan e-KTP dan mempersiapkan data penduduk untuk perekaman e-KTP. Selain itu koordinasi antara masing-masing bagian juga telah dilaksanakan dengan cara membagi-bagi tugas terkait pelaksanaan program e-KTP.

Dari hasil wawancara dengan indikator perilaku maka diketahui bahwa pegawai di Kantor Camat Kecamatan Selebar telah melaksanakan kerja sama dalam mensukseskan pelaksanaan program e-KTP, baik itu kerjasama antar individu, antara atasan dan bawahan ataupun antara sesama staaaf, serta kerjasama antar bagian-bagian dalam mendukung program e-KTP. Malayu (1996) dalam Husein Umar, *reseach* sumber daya manusia, menyatakan bahwa adanya tiga jenis hubungan dalam organisasi yang dapat membantu terwujudnya tujuan secara optimal yaitu:

- a. Hubungan tunggal langsung (*direct single relationships DRS*), ialah hubungan langsung diantara bawahan dan atasannya.
- b. Hubungan kelompok langsung (*direct group relationships DGR*), ialah hubungan langsung antara atasan dan para bawahannya.
- c. Hubungan silang (*cross relationships CR*), ialah hubungan antara bawahan yang disaksikan oleh atasan.
- d. Total hubungan (TH) merupakan total hubungan yang perlu di lakukan manajer jika semakin banyak akan semakin sulit di lakukan, begitu pula sebaliknya, semakin sedikit hubungan yang harus dilaukan akan semakin efektif.

Implikasi Strategis

Implikasi strategis merupakan langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan terhadap persepsi, sikap, dan perilaku pegawai terhadap pelaksanaan e-KTP di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Indikator pertama yaitu persepsi pegawai di Kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menyikapi pelaksanaan program e-KTP, dari hasil penelitian secara umum pegawai telah memiliki persepsi yang sama dalam memandang, menyimpulkan, dan menilai pelaksanaan e-KTP, hal tersebut merupakan suatu faktor penting karena dengan adanya kesamaan persepsi maka akan menciptakan hal positif bagi pegawai dalam pelaksanaan program e-KTP. Kesamaan persepsi pegawai dalam pelaksanaan e-KTP harus dipertahankan karena dapat membantu pihak kecamatan dalam memaksimalkan pelaksanaan e-KTP, dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kantor camat kecamatan Selebar adalah menyusun jadwal pertemuan dalam rangka membahas perkembangan dan pelaksanaan e-KTP, melaksanakan sosialisasi ulang terkait penerapan e-KTP kepada pegawai dan masyarakat yang belum memahami secara jelas pelaksanaan e-KTP.

Indikator kedua yaitu sikap pegawai di Kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menyikapi pelaksanaan program e-KTP, dari hasil penelitian secara umum pegawai sudah mendukung pelaksanaan program e-KTP, meskipun masih terdapat masalah utama yaitu sikap negatif dari pegawai karena e-KTP memberikan beban kerja yang berlebih kepada pegawai teknis perekaman e-KTP. Untuk dapat melaksanakan optimalisasi pelaksanaan e-KTP tentunya sikap negatif ini harus segera di eliminasi, dalam hal ini strategi yang dapat dilakukan oleh pihak kecamatan adalah dengan memotivasi pegawai teknis lewat pemberian insentif, selain itu penambahan jadwal training bagi pegawai teknis masih sangat diperlukan sehingga pegawai dapat lebih mahir dalam mengoperasikan alat e-KTP, serta mampu mengatasi jika terjadi gangguan atau masalah pada alat perekaman e-KTP.

Indikator ketiga adalah perilaku pegawai di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menyikapi pelaksanaan program e-KTP, dari hasil penelitian pegawai telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mensukseskan pelaksanaan program e-KTP. Mulai dari tanggung jawab tugas secara individu hingga kerja sama antar pegawai dan bagian dalam suksesi pelaksanaan e-KTP, maka dari itu hal tersebut perlu dipertahankan dan tingkatkan agar nantinya dapat lebih maksimal dalam mendukung pelaksanaan program e-KTP, solusi yang dapat dilakukan oleh pihak kecamatan Selebar adalah dengan cara memperbaiki dan meninjau ulang tugas dari masing-masing bagian yang telah dibagi terkait suksesi pelaksanaan e-KTP, hingga nantinya dapat tercipta pembagian tugas yang efektif dan efisien.

Dari berbagai implikasi strategis diatas terkait persepsi, sikap, dan perilaku pegawai dalam pelaksanaan program e-KTP di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka salah satu manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah agar hasilnya dapat dijadikan masukan bagi kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam upaya untuk mengetahui perilaku organisasi terhadap pelaksanaan program e-KTP secara keseluruhannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Secara umum pegawai di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah memiliki persepsi yang sama dalam memandang, menyimpulkan, dan menilai pelaksanaan e-KTP. Pegawai memandang e-KTP sebagai program yang ditujukan untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk, sehingga nantinya akan tercipta data penduduk yang akurat dan akuntabel, e-KTP juga dianggap memiliki keunggulan dari sistem KTP manual karena memiliki ciri khusus di setiap individu yang memilikinya, dan pelaksanaan perekaman e-KTP di kecamatan Selebar juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ada.
2. Sikap pegawai di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan e-KTP secara umum mendukung pelaksanaan program tersebut, walaupun masih terdapat pegawai yang memiliki perasaan keberatan dalam pelaksanaan e-KTP, karena menambah beban kerja.
3. Perilaku pegawai di kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menyikapi pelaksanaan e-KTP, tampak dari adanya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu secara individu ataupun kelompok dalam mendukung program e-KTP, pegawai melakukan kerjasama antar bagian untuk saling membagi tugas, baik itu sosialisasi atau pengumuman e-KTP, pelaksana tehniks perekaman e-KTP, dan kerjasama dengan pihak Kependudukan dan catatan sipil daerah.
4. Persepsi, sikap, dan perilaku positif pegawai di Kantor Camat Kecamatan Selebar secara umum mendukung terlaksananya program e-KTP, hal tersebut adalah penting karena dapat membantu optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program e-KTP.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kantor camat kecamatan Selebar Kota Bengkulu maka peneliti memberikan beberapa saran yang perlu di lakukan oleh pegawai, dalam meningkatkan pelayanannya terkait pelaksanaan e-KTP:

1. Persepsi pegawai yang sama dalam memandang, menyimpulkan, dan menilai pelaksanaan e-KTP harus dipertahankan karena dapat membantu pihak kecamatan dalam memaksimalkan pelaksanaan e-KTP.
2. Adanya sikap negatif pegawai karena program e-KTP yang memberikan beban kerja yang berlebih kepada pegawai teknis perekaman e-KTP, dapat ditanggulangi dengan pemberian

- insentif, pemberian training terhadap petugas teknis perekaman e-KTP perlu di adakan lagi, sehingga petugas dapat lebih baik dalam mengoperasikan alat perekam elektronik KTP.
3. Perilaku positif dari pegawai di Kantor Camat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menyikapi pelaksanaan program e-KTP, perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar nantinya dapat lebih maksimal dalam mendukung pelaksanaan program e-KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Azwar, S. 2007. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Edisi ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Herminta, tahun 2008, <http://teori persepsi menurut para ahli/?p=755>, diakses pada tanggal 02 januari 2012.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Kreitner, Robert & Kinicki, Angelo. 2005. *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Luthas, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke 10. Diterjemahkan Oleh: Vivin Andhika Y, Dkk. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mangkunegara, Anwar Prabu 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mochtar, M. 2000. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Nasution, S. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, ohammad. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010, tentang penyelenggaraan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/e-KTP.
- Robbins, P. Stephen, 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep, Konteropersi, aplikasi*, Jilid I Edisi Ke 8. Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka & Benyamin Molan, Jakarta: PT. Prehallinda.
- Robbins, P. Stephen, dan Judge, Timothy, A. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Schiffman & Kanuk, tahun 2007, Itsnasahma.blogspot.com/persepsi.html. diakses pada 02 Januari 2012
- Thoha Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif)

Revan Hardiawan
Kamaludin dan Nasution

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Jalan Raya Kandang Limun, Bengkulu 38371A

ABSTRACT

The aim of this study is to describe the implementation of SIMDA version 2.1 at Bappeda Office Kepahiang Regency based on the employee's perception and attitude. To answer the research questions, researcher use a qualitative descriptive approach with in depth interview and documentation study methods. The samples used in this study consist of 11 respondents who work as employee at Bappeda Office at Kepahiang Regency. The results show that there is a negative perception from the employees upon the implementation of SIMDA version 2.1, however, in general the employees support the implementation of the application. The preparation of the implementation which have been done are less adequate which become as challenging factors to the implementer. The effort to increase the human resource capacity and to increase the infrastructure are also needed to take into point in order to achieve the same perception from the employees and maintaining the employees' positive attitude.

Keywords: Perception, Attitude, Preparation, The challenging and supporting factors, employees.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari keterpaduan dan sinergisitas seluruh elemen perangkat daerah yang ada di dalamnya. Dukungan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu langkah pendukung yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang No. 12 Tahun 2008 maka berbagai kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan.

Kewenangan yang dimiliki daerah menjadikannya dapat menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Anggaran pembangunan yang disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan daerah tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan anggaran pembangunan yang disusun dengan prinsip keseragaman antar daerah. Anggaran pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi terjadinya pemborosan sebagai akibat program pembangunan yang tumpang tindih.

Keleluasaan pemerintah daerah tetap berada dalam lingkup pengawasan pemerintah pusat, melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan kedua undang - undang tersebut maka Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*

dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah memerlukan sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif, meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah Program Aplikasi Komputer SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) versi 2.1. Program aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah. Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akuntabilitas dan transparan. Diharapkan dengan adanya aplikasi SIMDA, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengukur kinerjanya sendiri.

Sosialisasi mengenai SIMDA Versi 2.1 di Kabupaten Kepahiang telah dimulai sejak tahun 2009, diawali dengan memperkenalkan aplikasi tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang dan pada tahun – tahun berikutnya aplikasi ini diperkenalkan ke seluruh SKPD di Kabupaten Kepahiang melalui pelatihan – pelatihan.

Pemahaman dan penguasaan aplikasi menjadi kendala tersendiri di daerah, khususnya di Kabupaten Kepahiang. Proses “*transfer of knowledge*” setidaknya memerlukan perhatian dan keseriusan dari kedua belah pihak, dalam hal ini BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

Penerapan SIMDA sebagai salah satu instrument untuk menuju *Good Governance* dan *e-Governance*, menuntut suatu daerah untuk memiliki sumber daya manusia yang cakap karena “Kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian-pencapaian tujuan organisasi, baik terhadap performance, profit, maupun kelangsungan hidup organisasi itu sendiri” (Mar’at, 1996).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka pokok masalah yang akan diambil dalam penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang melalui persepsi dan sikap pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, persiapan serta faktor penghambat/pendukungnya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang.

Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu:

- Memberikan kontribusi pemikiran kepada pejabat dan seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 dari beberapa sudut pandang yang selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka persiapan implementasi aplikasi ini ke depannya.

- Bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi rekan-rekan sesama peneliti, akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan variabel atau sudut pandang yang berbeda.

Persepsi

Thoha (2002) persepsi didefinisikan sebagai kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman selanjutnya menurut Schiffman & Kanuk (2007) persepsi adalah suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang penuh arti dan saling terkait.

Apabila dikaji lebih lanjut definisi persepsi menurut para ahli di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai ciri – ciri persepsi sebagai berikut:

- a. Persepsi merupakan cara pandang/ sudut pandang. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1993).
- b. Adanya stimulus (input), pengorganisasian stimulus dan penterjemahan atau penafsiran stimulus.
- c. Adanya pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan – hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan.
- d. Adanya proses pemberian arti terhadap lingkungan seorang individu.

Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan dunia disekeliling kita adalah bahwa diri masing – masing orang memiliki persepsi sendiri tetapi persepsi keluar dengan cara yang berbeda sesuai dengan situasi yang ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatis dan persepsi bekerja dengan cara yang hampir serupa pada setiap masing – masing individu. Sekalipun demikian, persepsi secara tipikal menghasilkan persepsi yang berbeda – beda.

Menurut Myers & Klein (2011), proses persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamata sendiri yang diwarnai oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap obyek psikologik tersebut. Melalui komponen kognisi ini akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan terhadap obyek tersebut. Selanjutnya komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap objek.

Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Newcomb salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan ‘pre-disposisi’ tindakan atau perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka tingkah laku terbuka. Lebih dapat dijelaskan lagi bahwa sikap merupakan reaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni :

- a. Menerima (*receiving*)
Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperlihatkan stimulus yang diberikan (objek)
- b. Merespons (*responding*)
Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, lepas pekerjaan itu benar atau salah, berarti orang yang menerima ide tersebut.
- c. Menghargai (*valuing*)
Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap ketiga.
- d. Bertanggung jawab (*responsible*)
Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pertanyaan responden terhadap suatu objek. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pertanyaan – pertanyaan hipotesis, kemudian ditanyakan pendapat responden dan biasanya jawaban berada dalam rentang antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju.

Menurut Sobur (2003), ciri khas sikap adalah mempunyai objek tertentu, contohnya orang, perilaku, konsep, situasi, benda dan sebagainya serta mengandung penilaian berupa suka – tidak suka, setuju – tidak setuju.

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Peranan informasi dalam suatu organisasi dan manajemen tidak perlu lagi diragukan. Informasi kini memegang peranan yang sangat dominan dalam satu pengolahan, pendistribusian, penyimpanan dan penemuan kembali informasi perusahaan/organisasi. Bahkan dapat dikatakan siapa yang memiliki dan menguasai informasi yang lengkap secara nasional, internasional/global, mereka/organisasi itulah yang terkaya di dunia. Tanpa ada informasi, para manajer, staf/karyawan dan anggota – anggota organisasi yang lainnya tidak dapat mengambil keputusan yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat menghubungkan satu unit informasi dengan unit – unit informasi lainnya menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, pembentukan sistem informasi yang akurat sangat diperlukan karena apabila satu unit macet/terganggu maka unit lainnya pun akan terganggu.

Menurut Gaol (2008), sistem informasi yang selain melakukan pengolahan transaksi yang sangat berguna untuk kepentingan organisasi, juga banyak memberikan dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan disebut Sistem Informasi Manajemen (SIM). Dalam hal ini Chr. Jimmy L. Gaol berasumsi bahwa organisasi dalam segala motif selalu membutuhkan sistem – sistem untuk mengklasifikasi, mengolah, menyimpan, melihat kembali/ menemukan kembali dan mendistribusikan informasi. Sedangkan menurut Gordon B. Davis dalam Gaol (2008), Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah kesatuan, sistem mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak computer, prosedur manual, model yang digunakan untuk menganalisis, merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan serta sebuah basis data.

Salah satu bentuk organisasi yang memerlukan pengelolaan informasi yang baik dan akurat adalah pemerintah di suatu daerah. Dalam lingkup pemerintah daerah terdapat informasi – informasi penting yang harus dikelola dengan baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan bisa mewujudkan visi misi daerahnya. Satu hal yang sering menjadi sorotan publik/masyarakat adalah sisi efisiensi dan transparansi penggunaan serta penyusunan laporan keuangannya. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), yaitu system yang mampu mengolah data – data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang disusun oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai badan pengawas yang membina pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

SIMDA Versi 2.1

SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan Kas Daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik.

Maksud dari pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku. Beranjak dari maksud tersebut, maka tujuan akhir dari SIMDA adalah mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya & penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, khususnya. Sesuai dengan tujuannya, penerapan SIMDA ini ditujukan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mampu menyelenggarakan proses penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintah yang berlaku. Penerapan dari SIMDA itu sendiri merupakan pilihan bagi masing-masing Pemerintah Daerah.

SIMDA Ver. 2.1 sendiri merupakan sistem informasi versi paling *update* yang telah berhasil dikembangkan oleh BPKP akibat adanya perubahan acuan peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem ini mulai diaplikasikan sejak tahun 2006 dan sampai sekarang masih digunakan dengan beberapa penyempurnaan, misalnya dengan adanya perubahan ketentuan pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Kerangka Analisis

Gambar 1. Kerangka Analisis

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bappeda Kabupaten Kepahiang dan penulis adalah salah seorang pegawai di kantor tersebut serta merupakan bagian dari subjek penelitian. Penelitian yang melibatkan peneliti secara langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar belakang yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar – benarnya, apa adanya dan catatan – catatan lapangan yang aktual adalah merupakan penelitian kualitatif (Denzin dan Lincoln, 1994) dalam Herdiansyah (2010).

Masih dalam Herdiansyah (2010), menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah – masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi serta dilakukan *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Gambaran mengenai masalah sosial yang dialami subjek penelitian dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian bisa didapatkan oleh peneliti dengan memperoleh informasi dari beberapa sudut pandang subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Soeratno, 2003).

Menurut Sekaran (2009), apabila studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi sekaligus memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek – aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya maka studi ini merupakan studi deskriptif.

Defenisi Operasional

Persepsi

Persepsi adalah rangkaian proses kognisi atau pengenalan dan evaluasi emosional pegawai negeri sipil (pejabat/staf) di Bappeda Kabupaten Kepahiang yang memungkinkan mereka untuk menafsirkan dan memahami tentang pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1

Sikap

Sikap adalah tindakan dalam bentuk respon setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung ataupun respon positif atau negatif dari pegawai negeri sipil (pejabat/staf) berkenaan dengan pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Persiapan

Persiapan adalah proses menuju kesiapan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang, meliputi hal – hal sebagai berikut:

- Penyediaan software aplikasi, komputer dan perlengkapannya beserta jaringannya (*Local Area Network*)
- Kompetensi sumber daya manusia dalam rangka implementasi SIMDA versi 2.1
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai SIMDA versi 2.1
- Kerjasama antar pegawai dalam implementasi SIMDA versi 2.1

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat adalah segala sesuatu yang berbentuk benda atau bukan benda yang ditemukan selama implementasi SIMDA versi 2.1 sehingga menjadikan proses penerapan aplikasi tersebut lancar/tidak lancar, terganggu/tidak terganggu atau pun berjalan/tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Metode Pengambilan Sampel

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang, maka populasi penelitian disini adalah seluruh pegawai yang berada di Bappeda Kabupaten Kepahiang. Agar dapat menampilkan dan menyajikan serangkaian perspektif guna menggambarkan kompleksitas dari apa yang diteliti, maka tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Non-probability Sampling* dengan tehnik *Purposeful Sampling* (Herdiansyah, 2010). Dalam *purposeful sampling*, masih menurut Herdiansyah (2010), peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menentukan subjek penelitian yaitu pegawai negeri sipil Bappeda Kabupaten Kepahiang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Beberapa pejabat (eselon) di Bappeda Kabupaten Kepahiang yang mengetahui/sering menggunakan aplikasi SIMDA versi 2.1.
2. Operator SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang
3. Bendahara pengeluaran Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Karyawan/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang aktif sebagai pengguna aplikasi SIMDA versi 2.1.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis akan menghimpun dan memperoleh data/informasi yang tepat dan akurat dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara
Menurut Miles & Huberman (1994), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dapat juga diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan

dengan kondisi satu orang melakukan/memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.

Menurut Nasution (2003), wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 2003). Sedangkan Padmowati (2004) mendefinisikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009).

Metode Analisis

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat siklus yang dilakukan sewaktu peneliti berada di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan penelitian. Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, ada tiga alur kegiatan proses analisis yang dilakukan peneliti secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Kepahiang

Bappeda merupakan salah satu bagian dari Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Kepahiang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Per April 2011, keseluruhan pegawai di Bappeda Kabupaten Kepahiang sebanyak 45 orang (PNS/CPNS).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang dan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang, maka dapat disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kepahiang mengemban tugas yaitu : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pernyataan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang adalah: ***“Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perancang pembangunan daerah yang terpercaya, aspiratif dan berbasis sumber daya yang berkualitas serta berfungsi sebagai lokomotif pembangunan yang akurat”.***

Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi

Karakteristik Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini sebanyak 11 orang dengan beberapa kualifikasi antara lain Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan karyawan/staf di Bappeda Kabupaten Kepahiang. Wawancara dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang pada saat jam kerja. Wawancara dan observasi dokumentasi dilakukan peneliti selama 2 bulan, yaitu dari bulan April – Mei 2012.

Deskripsi Hasil Penelitian Persepsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Bappeda Kabupaten Kepahiang, untuk indikator pertama yaitu pandangan pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, secara umum dapat disimpulkan bahwa terkait dengan implementasi kebijakan penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, khususnya di Bappeda, para pejabat/atasan memiliki kesamaan persepsi. Karyawan/staf memberikan pandangan bahwa dalam implementasi SIMDA versi 2.1 secara teknis di lapangan mereka tidak mengetahui keseluruhan langkah – langkah penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 secara umum begitupun dengan pemahaman terhadap menu – menu program yang ada di dalam aplikasi SIMDA versi 2.1. Dua dari 5 (lima) orang responden yang merupakan karyawan/staf menyatakan pernah ikut pelatihan aplikasi SIMDA versi 2.1 namun hanya sekedar mengetahui langkah – langkah secara umum dari penganggaran sampai dengan pelaporan namun tidak memahami keseluruhan penggunaan menu – menu program yang ada di aplikasi SIMDA versi 2.1. Dua orang berikutnya menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 dan mendapatkan pengetahuan tentang SIMDA versi 2.1 hanya dari berkonsultasi dan belajar sendiri dan sampai saat ini hanya memahami proses penganggaran saja. Satu orang lagi

juga menyatakan belum pernah ikut pelatihan penggunaan aplikasi SIMDA versi 2.1 dan hanya memahami sebagian kecil dari bagian penatausahaan saja.

Selanjutnya mengenai pandangan pegawai secara umum terhadap implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang memberikan beberapa sisi pandangan, ada beberapa orang pejabat/atasan memberikan pandangan positif terhadap hal tersebut, dalam artian bahwa secara umum implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang sudah baik dalam pelaksanaannya walaupun diantara pejabat/atasan yang berpandangan positif ini juga menambahkan beberapa kekurangan di dalam kondisi baik tersebut, seperti masih kurangnya sarana prasarana pendukung dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap aplikasi ini yang masih dinilai kurang. Beberapa orang pejabat/atasan dan karyawan/staf memberikan pandangan negatif terhadap implementasi SIMDA versi 2.1 secara umum di Bappeda Kabupaten Kepahiang, dengan kata lain pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang dipandang belum maksimal dan masih sedikit rumit dengan menyebutkan penyebabnya antara lain adalah kompetensi SDM dan kurangnya dukungan sarana prasarana dari Bappeda itu sendiri. Sedikit berbeda, beberapa orang staf mengatakan bahwa implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang hanya berjalan sebagaimana mestinya atau apa adanya saja. Mereka memberikan pandangan bahwa implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang hanya sekedar pelaksanaan dari kebijakan atasan dan bukan pelaksanaan program perubahan, namun tetap merasa bahwa SIMDA versi 2.1 bisa membantu pekerjaannya.

Sikap

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pejabat dan karyawan Bappeda tentang sikap pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, dengan indikator yang pertama identifikasi pegawai terhadap implementasi SIMDA versi 2.1, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pegawai Bappeda mendukung pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1.

Persiapan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang telah dilakukan persiapan sumber daya manusia (SDM) berupa kegiatan sosialisasi terhadap SIMDA versi 2.1 sekaligus bimbingan teknis aplikasi SIMDA versi 2.1. Selain pernyataan di atas, ada responden yang memberikan pernyataan tambahan mengenai persiapan SDM ini, diantaranya bahwa sosialisasi dan bimtek tersebut tidak khusus bagi Bappeda Kabupaten Kepahiang tetapi juga mengundang personil dari SKPD lainnya. SDM dari Bappeda pun hanya beberapa orang saja dan ada responden yang mengatakan bahwa SDM yang pernah mengikuti ini pun ada beberapa orang yang tidak bertugas lagi di Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh karyawan/staf pernah menemukan penghambat atau kendala dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1.

Selanjutnya, semua responden juga menyatakan masih memerlukan pihak luar, oleh penulis dicontohkan BPKP, untuk membantu dan membimbing pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang. Beberapa responden juga mencontohkan secara langsung bentuk bantuan atau bimbingan yang mereka inginkan, seperti bimbingan teknis atau pelatihan secara berkala (3 bulan x 1 kali) oleh pihak BPKP. Mengenai faktor pendukung dalam implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang, dari 5 (lima) orang responden, 3 (tiga) orang responden menyatakan di dukung oleh atasannya dengan diberikan fasilitas seperti laptop bahkan ada yang diberikan honorarium sebagai Operator SIMDA namun 2 (dua) orang menyatakan bahwa faktor pendukung bagi mereka adalah keingintahuan dan motivasi mereka untuk mendalami aplikasi SIMDA versi 2.1.

Pembahasan

Persepsi

Secara umum, pejabat/atasan di Bappeda Kabupaten Kepahiang mempersepsikan bahwa SIMDA versi 2.1 telah dilaksanakan dengan baik, yang berarti keinginan untuk memiliki sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), sistem yang mampu mengolah data-data (*input*) dan menghasilkan informasi (*output*) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif, meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, sesuai dengan tujuan utama dalam penerapan aplikasi ini, sudah terwujud.

Apabila persepsi atasan mengenai implementasi SIMDA versi 2.1 dianggap sebagai pandangan positif maka persepsi staf mengenai implementasi SIMDA versi 2.1 ini bisa dianggap sebagai pandangan negatif. Secara umum, karyawan/staf Bappeda Kabupaten Kepahiang berpandangan bahwa implementasi SIMDA versi 2.1 belum maksimal, bahkan ada pandangan bahwa implementasi aplikasi ini hanya sebatas menunaikan perintah dari atasan saja. Beberapa karyawan dan staf pun menyatakan belum pernah diikuti sertakan dalam pelatihan atau bimbingan teknis mengenai SIMDA versi 2.1.

Menurut Alport (dalam Mar'at, 1991) bahwa proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Dari informasi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa persepsi negatif karyawan/staf timbul karena faktor kurangnya pengetahuan individu akan aplikasi SIMDA versi 2.1 yang selama ini mereka gunakan.

Sikap

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang memiliki tanggapan yang sama yaitu mendukung pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 dan pernyataan dukungan ini disertai berbagai alasan. Menurut Kreitner dan Kinicki (2005), bahwa sikap sebagai kecenderungan merespons sesuatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan suatu objek tertentu dan Azwar (2007) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Walaupun sebelumnya persepsi negatif terhadap aplikasi SIMDA versi 2.1 muncul dari karyawan/staf, namun untuk respon penggunaan aplikasi ini ke depannya, pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang menyatakan sikap mendukung implementasi SIMDA versi 2.1. Pengaruh orang lain yang dianggap penting berperan dipernyataan sikap ini. Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah menjadi kewajiban untuk patuh kepada perintah atasan sehingga menjadikan kewajiban ini sebagai motivasi dalam mensukseskan kebijakan implementasi SIMDA versi 2.1.

Persiapan

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada pejabat/atasan Bappeda tentang persiapan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan implementasi SIMDA versi 2.1 di kantor Bappeda sendiri dengan indikator persiapan sumber daya manusia, maka dapat dilihat bahwa persiapan yang pernah dilakukan yaitu berupa sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan pada tahun 2009. JB Kristiadi dalam Padmowati (2004) menyebutkan bahwa pelaksanaan sistem pelatihan akan sangat menunjang pencapaian tujuan organisasi. Namun berdasarkan penjabaran persiapan yang pernah dilakukan, peneliti menanyakan persiapan SDM tentang pemahaman PNS Bappeda Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan implementasi SIMDA versi 2.1 kepada pejabat/atasan, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat/atasan Bappeda memiliki pandangan bahwa PNS Bappeda Kabupaten Kepahiang belum memiliki pemahaman yang cukup dalam melaksanakan implementasi SIMDA versi 2.1 ini. Pelatihan yang

telah dilaksanakan, bagi personil pelaksana (karyawan/staf) dirasakan belum mencukupi kebutuhan informasi mengenai SIMDA versi 2.1.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada staf/karyawan Bappeda Kabupaten Kepahiang maka dapat disimpulkan bahwa kendala atau faktor penghambat ditemui oleh semua pegawai Bappeda Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1. Berbagai macam kendala yang muncul, berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pemahaman karyawan/staf dan beberapa orang dari karyawan/staf menambahkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Menurut Padowati (2004) bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam rangka implementasi SIMDA dan Mar'at (1996) menyatakan bahwa faktor informasi merupakan faktor yang paling dominan dalam pelaksanaan *good governance*. Berdasarkan pernyataan – pernyataan di atas, proses penyampaian pengetahuan sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi aplikasi SIMDA versi 2.1. Pendidikan dan pelatihan dijadikan sarana dalam menyampaikan segala sesuatu informasi mengenai perkembangan aplikasi SIMDA sehingga pembentukan personil yang terampil dalam pelaksanaan Sistem Akutansi yang menghasilkan Laporan Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel dapat terwujud di setiap pemerintah daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum antara pejabat/atasan dengan karyawan/staf Bappeda Kabupaten Kepahiang, memiliki perbedaan persepsi dalam memandang pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 yang disebabkan oleh perbedaan wewenang dalam struktur organisasi dan secara umum sikap pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepahiang ialah mendukung pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mensukseskan implementasi SIMDA versi 2.1 di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan, telah dilaksanakan persiapan implementasi SIMDA versi 2.1, khususnya di Bappeda Kabupaten Kepahiang melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis serta Dalam pelaksanaan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang masih banyak ditemukan kendala – kendala teknis yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman dan kemampuan teknis SDM pelaksananya dan faktor pendukung, seperti penyediaan sarana prasarana kerja dan peningkatan motivasi pegawai, semaksimal mungkin terus diusahakan guna mendukung kesuksesan implementasi SIMDA versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang.

Saran

SIMDA versi 2.1 diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu beberapa pembenahan berupa sarana dan prasarana pendukung, pelatihan atau bimbingan teknis bagi SDM pelaksana secara berkala seharusnya menjadi prioritas kegiatan bagi Bappeda Kabupaten Kepahiang

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, R. L, Atkinson, R. C & Hilgard, E. R. (1993). Pengantar Psikologi. Alih Bahasa: Nurjanah Taufiq. Jakarta: PT. Erlangga.
- Azwar, S. (2007). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia. (2010).
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gaol, Chr. Jimmy L. (2008). *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Herdiansyah, H. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Seni dan Memahami Fenomena Sosial*. Yogyakarta: Greentea Publishing.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2005). *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Mar'at. (1996). *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Miles, M. B & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. 2nd edition. California: Sage.
- Myers, D. M., & Klein, K. H. (2011). A Set of Principles Conducting Critical Research in Information System. *MIS Quarterly*. Vol. 35 91). Pp. 17-36.
- Padmowati, Sri. (2004). *Implementasi Sistem Manajemen Daerah di Kabupaten Jepara (Hubungan Antara Variabel Pendidikan Latihan, Partisipasi Pegawai serta Kemampuan Kerja dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang, Nomor 5, (2008).
- Schiffman & Kanuk. (2007). Itnasahma.blogspot.com/persepsi.html. Diakses pada tanggal 02 Januari 2012.
- Sekaran, U. (2009). *Metodologi penelitian Untuk Bisnis*. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soeratno & Arsyad, L. (2003). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Thoha, M. (2002). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar & Aplikasinya*. Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada.